



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online
(ePaper)*

SUBJEK

EKONOMI

Selasa, 7 Mei 2024

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2024**

Daftar Isi

1. EKONOMI TUMBUH, TETAPI BELUM STABIL DAN BERKUALITAS – *Media Online Kompas*
2. PUSAT DAERAH BELUM SINKRON – *Media Online Kompas*
3. MUSRENBANGNAS 2024, PRESIDEN TEGASKAN URGENSI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL – *Media Online Kompas*
4. EFEK COVID-19 SUDAH BERAKHIR? – *Media Online Bisnis Indonesia*
5. MESIN MANUFAKTUR RAWAN MACET – *Media Online Bisnis Indonesia*
6. RKP 2025 PIJAKAN AWAL CAPAI VISI INDONESIA EMAS – *Media Online Media Indonesia*
7. DOMESTIC SPENDING BUOYS GDP GROWTH IN FIRST QUARTER – *Media Online The Jakarta Post*
8. PERTUMBUHAN MASIH ANDALKAN KONSUMSI – *Media Online Investor Daily*
9. EKONOMI SOLID, TINGKAT PENGANGGURAN MENURUN – *Media Online Investor Daily*

Ekonomi Tumbuh, tetapi Belum Stabil dan Berkualitas

Selain lebih banyak ditopang oleh faktor musiman, pertumbuhan ekonomi dinilai belum mampu membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Kendati tumbuh 5,11 persen, pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini dinilai belum cukup stabil dan berkualitas. Kinerja ekonomi lebih banyak tertolong oleh faktor musiman, bukan ditopang sektor utama. Penciptaan lapangan kerja pun belum cukup masif sehingga mayoritas penduduk masih bekerja di sektor informal.

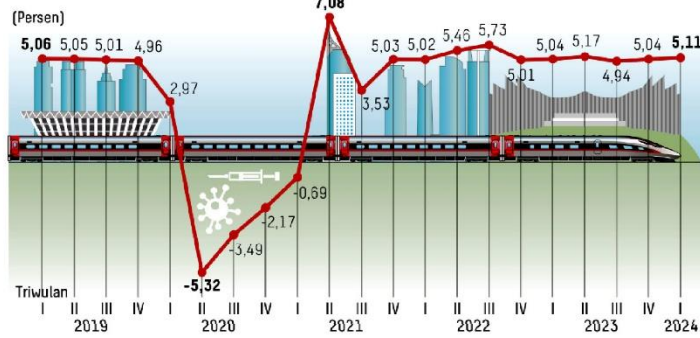
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang triwulan I tahun 2024 (Januari-Maret) nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.288,3 triliun, sementara PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.112,9 triliun.

Dengan capaian itu, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 tumbuh 5,11 persen secara tahunan meski berkontraksi 0,83 persen secara triwulanan. Secara historis, ini capaian pertumbuhan triwulan I tertinggi dalam sembilan tahun atau sejak 2015.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyananti mengatakan, kondisi ekonomi mampu tumbuh solid di tengah ketidakpastian global karena didukung geliat aktivitas dalam negeri yang dinamis di awal tahun. Ini khususnya akibat momentum Pemilu 2024, Ramadhan, dan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri.

"Di tengah penurunan harga komoditas produk utama ekspor, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh solid 5,11 per-

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019-2024



- Pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year (dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya).
- Ekonomi triwulan I-2024 yang ekspansif lebih didorong oleh ekonomi domestik, terutama pemilu dan Ramadhan.

Sumber: Badan Pusat Statistik. Dilah: Litbang Kompas/TIN

sen secara *year on year*. Ini ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik kita," kata Amalia dalam konferensi pers hibrida yang digelar di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Tertolong faktor sesaat

Aktivitas ekonomi yang menopang pertumbuhan di awal tahun ini umumnya bersifat musiman atau temporer, seperti pemilu dan aktivitas selama bulan Ramadhan. Jika dibedah, kontribusi faktor musiman itu terlihat jelas, baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha.

Dari sisi pengeluaran, komponen yang pertumbuhannya tertinggi adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh 19,9 persen serta konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRPT) yang tumbuh 24,29 persen akibat aktivitas pemilu. Biasanya, kedua komponen yang perannya kecil ini tumbuh hanya satu digit.

Sementara itu, kinerja komponen utama yang semestinya berkontribusi besar terhadap ekonomi justru cenderung moderat di awal tahun. Hal itu terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya

4,91 persen alias di bawah level ideal 5 persen.

Demikian pula pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang menggambarkan kinerja investasi hanya tumbuh 3,79 persen. Komponen ekspor dan impor juga hanya tumbuh 0,50 persen dan 1,77 persen di tengah lambatnya perdagangan global.

Dari sisi lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah administrasi pemerintahan hingga 18,88 persen akibat peningkatan belanja pegawai lewat kenaikan gaji aparatur sipil negara dan tunjangan hari raya.

Sektor jasa kesehatan juga tumbuh 11,64 persen karena didukung peningkatan belanja pegawai institusi kesehatan pemerintah serta jasa perusahaan yang tumbuh 9,63 persen karena aktivitas penyelenggara acara untuk pemilu.

Kinerja sektor utama yang berkontribusi besar terhadap ekonomi justru moderat, bahkan berkontraksi. Industri pengolahan hanya tumbuh 4,13 persen, perdagangan hanya tumbuh 4,58 persen, sedangkan pertanian justru berkontraksi -3,54 persen akibat penurunan produksi komoditas pangan yang terdampak El Nino.

Kesempatan kerja terbatas

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, secara kuantitas pertumbuhan ekonomi memang terlihat aman, tetapi secara kualitas capaian itu

Hlm: 1 - Kolom: Halaman Depan

Pusat-Daerah Belum Sinkron

Ketidakselarasan program pembangunan pusat dan daerah membuat pembangunan belum berkontribusi besar pada kesejahteraan rakyat.

JAKARTA, KOMPAS — Belum optimalnya penyalarsan atau sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat tercapainya sasaran target rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Program pembangunan dari level kementerian/ lembaga hingga daerah harus sejalan demi tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Masalah sinkronisasi program pembangunan di pusat dan daerah menjadi perhatian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Pelaksanaan Musrenbangnas 2024 dibuka dengan arahan Presiden Joko Widodo. Turut hadir sebagai pembicara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Menurut Suharso Monoarfa, rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menjadi jendela dari program pemerintah untuk menentukan keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Upaya mencapai target sangat bergantung pada sinkronisasi program pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

"Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan, diperlukan keselarasan antara pusat

Komponen Pendapatan dalam APBD Tahun 2018-2023



dan daerah, terutama pada indikator makro pembangunan serta rencana program dan kegiatan," kata Suharso.

Sebelumnya, saat memberikan arahan, Presiden Joko Widodo menyayangkan masih kerap ditemukan ketidakselarasan antara program pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan, di sebuah daerah, pemerintah pusat telah membangun bendungan. Namun, di tahun bendungan tersebut selesai dibangun, pemerintah daerah tidak menyiapkan program pembangunan irigasi sekunder hingga tersier agar aliran dari bendungan sampai ke sawah.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, Suharso menambahkan,

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar transformasi Indonesia menuju tingkat lebih tinggi.

Bagi pemerintah daerah, lanjutnya, RKP 2025 akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adapun arah pembangunan yang termuat dalam RKP 2025 bisa menjadi acuan badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta untuk berpartisipasi dan berkolaborasi mendukung pencapaian pembangunan.

Dalam RKP 2025, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi pada kisaran

5,3-5,6 persen. Sasaran target tersebut ditopang dengan target belanja pemerintah yang bertambah dari 14,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN 2024 menjadi 16,15-17,8 persen terhadap PDB. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,96-13,35 persen terhadap PDB serta transfer ke daerah 4,19-4,45 persen terhadap PDB.

Ketimpangan fiskal

Di tengah target belanja pemerintah yang semakin jorjoran, Suharso mengungkap permasalahan akan tingginya ketergantungan pelaksanaan program pemerintah daerah terhadap dana transfer ke daerah yang dalam kurun enam

tahun terakhir mencapai 83 persen secara rata-rata nasional.

Di sisi lain, rasio pajak daerah masih sangat rendah dengan rata-rata rasio pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia pada 2021 berada di angka 0,51 persen. Kondisi ini membuat pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu mendanai infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya.

Suahasil Nazara meminta pemerintah daerah memperhatikan sinkronisasi saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam program pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Mohon ketika menyusun perencanaan APBD lihat sinkronisasi belanja domestik, belanja untuk UMKM, belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mengutamakan produk dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, Tito Karnavian kembali mengingatkan agar kepala daerah mengelola dan menyusun keuangan dengan efektif. Ia menyentil selama ini masih banyak pemerintah daerah berpikir soal hanya menghabiskan anggaran dan parahnya lagi di akhir tahun. Pemda juga harus berorientasi meningkatkan PAD.

"APBD tidak akan cukup untuk menyejahterakan rakyat, terutama jika hanya mengandalkan transfer dari pusat," tuturnya. (DIM/WKM)

Musrenbangnas 2024, Presiden Tegaskan Urgensi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program-program pembangunan. Hal tersebut terungkap saat Presiden memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024).

Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, rencana menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tetapi yang perlu ditingkatkan adalah sinkronisasi. Oleh sebab itu, sinkronisasi menjadi kunci. Dari level kementerian sampai daerah, semuanya harus sejalan," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi memberikan contoh pembangunan pelabuhan yang dibuat pemerintah pusat semestinya juga didukung pemerintah daerah dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan.

"Semuanya harus *in line* dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPJPN), Rancangan Teknikal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMNM), RKP, kementerian, hingga ke daerah juga harus sejajar," ujar Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharno Monardi menjelaskan, Rancangan Awal RKP 2025 telah memuat agenda penting yang mengacu pada RJPJPN 2025-2045, RJMNM 2025-2029, termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program presiden terpilih.

"Integrasi dengan program presiden terpilih akan terus dilakukan hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025," ungkap Suharno.

Usa menapakan, RKP harus mengintegrasikan prinsip dasar, yaitu harmonisasi program pusat dan daerah, orientasi hasil yang produktif, serta akurasi

dasar dan strategi alokasi anggaran. RJPJPN 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas 2045 hanya akan berhasil jika dipedomani baik oleh RJPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta RKP.

"Untuk dapat menjaga keberlanjutan pembangunan, diperlukan adanya keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada Indikator Makro Pembangunan serta rencana program dan kegiatan," terang Suharno.

La juga menerangkan bahwa pemerintah daerah diharapkan sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang terwujud dalam RJPJPN, RJMNM, dan RKP. Rencana Pembangunan nasional ini dikoordinasikan, disinkronkan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di dalam rencana pembangunan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang diimplementasikan dalam RJPJPD, RJMND, dan RKPd.

Suharno juga menjelaskan capaian kinerja pemerintah dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5 persen selama 10 tahun terakhir.

Perumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2024 contohnya, mencapai 5,11 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Diikuti kemiskinan juga turun menjadi satu digit. Dari awalnya 11,25



persen pada Maret 2014 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023," sebut Suharno.

Penyediaan lapangan kerja, paparnya, juga mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat. "Yang semula 1,87 juta (lapangan kerja) pada 2014 menjadi 4,57 juta pada periode 2023. Sementara itu, rasio ketimpangan atau gini ratio juga turun menjadi 0,388 pada 2023, dari yang semula pada 2014 sebesar 0,406," terang Suharno.

La juga memamerkan peningkatan nilai tukar petani selama 10 tahun terakhir. "Pada 2014, indeksnya 102. Naik menjadi 112,46 pada 2023. Naik lebih dari 10 poin," katanya.

Penyusunan anggaran

Pada Musrenbangnas tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan memperhatikan skala prioritas.

"Kehati-hatian kita dalam meng-

ola fiskal, mengelola anggaran benar-benar harus *prudent*, benar-benar harus hati-hati jangan sampai ada uang seaneh pun meler dari rencana yang sudah kita buat, dan benar-benar memperhatikan skala prioritas," tegas Presiden.

Jokowi juga meminta agar program yang disusun dalam Musrenbangnas 2024 ini harus tepat sasaran dan strategis. Artinya, APBD dan APBN harus memiliki sasaran yang terlihat karena tepat sasaran.

"Artinya, APBD dan APBN itu benar-benar manfaatnya kelihatan karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk *stunting*, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas, ada jangan bilang enggak ada, ada. Enggak ada hubungannya *stunting* sama pagar," ungkap Kepala Negara.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga memiliki andil signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. "UMKM dan belanja dalam negeri adalah penggerak pertumbuhan ekonomi kita. Mohon nanti ketika melakukan perencanaan APBD, perhatikan sinkronisasi belanja domestik, belanja UMKM, belanja infrastruktur, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan yang mengutamakan produk dalam

Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, rencana menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tetapi yang perlu ditingkatkan adalah sinkronisasi. Oleh sebab itu, sinkronisasi menjadi kunci.

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

negari dari produk UMKM-UMKM kita," ucap Suahasil.

Apresiasi pemerintah daerah

Dalam Musrenbangnas 2024, Presiden didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 kepada daerah yang berhasil meraih capaian terbaik dalam penyusunan, implementasi, dan inovasi perencanaan pembangunan.

"Kementerian PPN/Bappenas memilih pemenang PPD berdasarkan kriteria komprehensif dan kreatif atas perencanaan pembangunan daerah. PPD turut mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan, serta mendorong sinergi dan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah. PPD dan Expo Pembangunan Daerah 2024 juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan memperkenalkan inovasi serta keunggulan daerah dalam perencanaan selanjutnya mencari solusi untuk tantangan pembangunan," jelas Suharno.

Adapun PPD 2024 diberikan dalam tiga kategori yaitu, provinsi, kabupaten, dan kota. Prediktor Provinsi Terbaik Pertama diraih Jawa Barat, Provinsi Terbaik Kedua Kalimantan Selatan, dan Provinsi Terbaik Ketiga DKI Jakarta. PPD 2024 kategori Kabupaten Terbaik Pertama diraih Kalimantan Tengah, Kabupaten Terbaik Kedua Banyuwangi dan Kabupaten Terbaik Ketiga Gowa. Prediktor Kota Terbaik Pertama diraih Malang, Kota Terbaik Kedua Palu, dan Kota Terbaik Ketiga Metro.

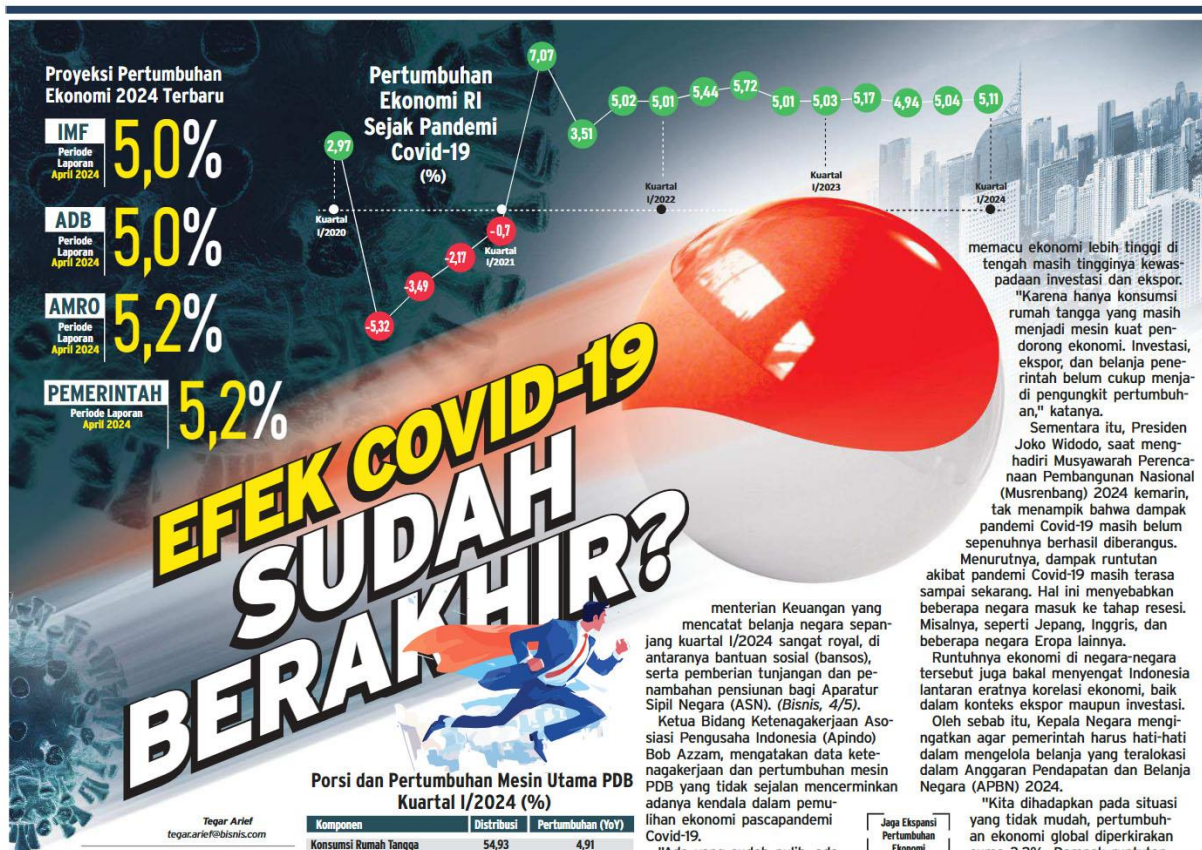
Penghargaan ini diharapkan dapat memberi motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja keras dan memberikan inovasi dalam pembangunan daerah," pungkias Suharno. [AS]



Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

SELASA, 6 MEI 2024



memacu ekonomi lebih tinggi di tengah masih tingginya kewaspadaan investasi dan ekspor. "Karena hanya konsumsi rumah tangga yang masih menjadi mesin kuat pendorong ekonomi. Investasi, ekspor, dan belanja pemerintah belum cukup menjadi pengungkit pertumbuhan," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2024 kemarin, tak menampik bahwa dampak pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya berhasil diberangus.

Menurutnya, dampak runtutan akibat pandemi Covid-19 masih terasa sampai sekarang. Hal ini menyebabkan beberapa negara masuk ke tahap resesi. Misalnya, seperti Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya.

Runtuhnya ekonomi di negara-negara tersebut juga bakal menyengat Indonesia lantaran eratnya korelasi ekonomi, baik dalam konteks ekspor maupun investasi.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati dalam mengelola belanja yang terlokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan cuma 3,2%. Dampak runtutan dari Covid-19 masih terasa sampai sekarang," jelas Presiden.

Kepala Negara menambahkan, seluruh yurisdiksi saat ini tengah dihantui oleh ketakutan yang senada, yaitu harga minyak dan tingginya suku bunga pinjaman yang sama-sama membebani pelaku ekonomi dan fiskal negara.

Wanti-wanti Presiden bukannya tanpa alasan. Fakta bahwa gejolak geopolitik yang melahirkan ketidakpastian cukup terasa ditandai dengan volatilitas harga minyak, kenaikan inflasi, suku bunga tinggi, gangguan perdagangan global, hingga pelemahan mata uang.

Kewaspadaan itu juga terefleksi dari proyeksi beberapa lembaga internasional, yang memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mampu tumbuh 5%, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2%. (Maria Elena/Annasa R. Kamalina/NI Luh Anggela/Akbar Evandio)

menterian Keuangan yang mencatat belanja negara sepanjang kuartal I/2024 sangat royal, di antaranya bantuan sosial (bansos), serta pemberian tunjangan dan penambahan pensiunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Bisnis, 4/5).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam, mengatakan data ketenagakerjaan dan pertumbuhan mesin PDB yang tidak sejalan mencerminkan adanya kendala dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"Ada yang sudah pulih, ada juga yang masih berjuang. Situasinya berbeda tergantung masing-masing perusahaan," katanya, Senin (6/5).

Senada, Wakil Ketua Urpum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, menambahkan Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang responsif, adaptif, dan prudent terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Shinta mengatakan, sangat penting bagi pemerintah memberikan perhatian yang serius pada perbaikan iklim investasi. "Ini sangat menentukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi bisa digenot," ujarnya.

LANJUTKAN BANSOS

Menanggapi dinamika ekonomi Indonesia terkini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang Indonesia belum berhasil lepas dari efek pandemi Covid-19 terutama dalam komponen konsumsi.

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada pemerintah untuk melanjutkan kebijakan bansos untuk menopang konsumsi rumah tangga. Hal itu menurutnya akan menjadi salah satu stimulus yang bisa

Porsi dan Pertumbuhan Mesin Utama PDB Kuartal I/2024 (%)

Komponen	Distribusi	Pertumbuhan (YoY)
Konsumsi Rumah Tangga	54,93	4,91
Konsumsi LNPR	1,43	24,29
Konsumsi Pemerintah	6,25	19,90
PMTB/Investasi	29,31	3,79
Ekspor Barang dan Jasa	21,37	0,50
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	19,77	-1,77

BISNIS/WIN CAHYONO

Sumber: Badan Pusat Statistik, APBN 2024, diolah

Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (6/5), telah melansir pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2024 mencapai 5,11% (year-on-year/YoY), tertinggi dalam tiga kuartal terakhir.

Sekilas, angka itu cukup mengembirakan lantaran produk domestik bruto (PDB) mampu melaju sesuai proyeksi di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Apalagi, beberapa mesin utama pendorong ekonomi berkinerjanya cukup ciamik sepanjang kuartal I/2024. Konsumsi pemerintah misalnya yang melesat hingga 19,9% (YoY), tertinggi sejak 2006. Pun dengan konsumsi rumah tangga maupun konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPR.

Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, data ekonomi tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor yang tidak berulang secara tahunan, salah satunya belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meski ada kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), juga terdorong dengan optimalisasi

investasi pemerintah.

Di sisi lain, jumlah pengangguran pada periode tersebut tercatat masih cukup tinggi. Per Februari 2024 jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,2 juta orang, lebih tinggi dibandingkan dengan 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 6,93 juta orang.

Menilik data tersebut, artinya lesatan konsumsi sepanjang kuartal I/2024 lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah melalui instrumen fiskal.

Hal itu terefleksi dari tidak liniernya jumlah pengangguran dengan tingkat konsumsi, yang salah satunya disebabkan karena belum maksimalnya penciptaan lapangan kerja baru.

Efek dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, membuat pemangku kebijakan masih mempertahankan belanja guna penebalan daya beli meski Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berakhir.

Hal itu pun ditegaskan dengan data Ke-



Hlm: 1 - Kolom: Halaman Depan

Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

SELASA, 6 MEI 2024

| STRUKTUR PDB RI |

MESIN MANUFAKTUR RAWAN MACET

Bisnis, JAKARTA — Sepintas lalu, data produk domestik bruto terkini sedikit bisa membuka senyum pemangku kebijakan, terutama dalam kaitan lapangan usaha pemacu ekonomi. Maklum, porsi manufaktur tercatat meningkat. Akan tetapi jika dicermati dengan teliti dan dikaitkan dengan dinamika terkini, tak ada alasan untuk menampik fakta miris industri nasional.

Annasa R. Kamalina & Tegar Arief
redaksi@bisnis.com

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis kemarin, Senin (6/5), porsi industri pengolahan atau manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terpantau meningkat dalam dua kuartal terakhir.

Kuartal IV/2023 manufaktur berkontribusi sebesar 19,08% terhadap PDB, sedangkan pada kuartal I/2024 naik tipis menjadi 19,28%. Tentu ini kabar yang menggembirakan di tengah kesibukan pemerintah menepis fakta deindustrialisasi.

Akan tetapi, ada dua catatan penting yang perlu diingat. *Pertama*, kenaikan itu masih sangat jauh dari syarat sebuah negara dikatakan sebagai negara industri.

Versi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), idealnya sebuah yurisdiksi disebut sebagai negara industri tatkala manufaktur berkontribusi setidaknya 30% terhadap PDB.

Becermim dari data tersebut, tentu angka 19% masih teramat jauh untuk menempatkan Indonesia sebagai barisan negara industri.

Kedua, aneka gejala baik dari domestik maupun global berisiko kembali menggerogoti porsi manufaktur ke PDB nasional. Ini pun diwaspadai oleh pemangku kebijakan.

Buktinya, mayoritas sektor usaha mencatatkan setoran pajak yang sangat rendah pada kuartal I/2024. Tak terkecuali pula industri pengolahan alias manufaktur.

Penyebabnya pun terbilang cukup sulit untuk diurai. Ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, perlambatan ekonomi negara mitra strategis, hingga inflasi dunia yang belum juga berhasil

dijinakkan.

Kesemua faktor itu tentunya menghambat aktivitas ekspor sehingga benuara pada terbatasnya geliat manufaktur untuk memenuhi permintaan di pasar global.

Sementara itu, pasar domestik yang konon menjadi salah satu andalan juga tak baik-baik amat. Maklum, daya beli masih dibayangi oleh lesatan inflasi, utamanya tatkala harga minyak dunia melonjak.

Belum lagi faktor kebijakan suku bunga acuan tinggi yang bertahan cukup lama alias *higher for longer*, yang tentunya membatasi penyaluran kredit baik untuk konsumsi maupun investasi.

Tak pelak, dunia usaha kembali dihadapkan pada ketidakpastian dan kecemasan yang meningkat sehingga fakta-fakta itu dikawatirkan akan mereduksi porsi manufaktur ke PDB.

Apalagi, PMI Manufaktur anjlok dari 54,2 menjadi 52,9 pada bulan lalu yang mengindikasikan adanya kelesuan dalam industri pengolahan. Apalagi, S&P Global mencatat adanya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara.

Pemerintah pun tak memungkir adanya kewaspadaan yang meningkat di kalangan dunia usaha pada tahun ini. Terlebih, data terkini dari otoritas fiskal mencatat adanya lonjakan restitusi, setidaknya pada kuartal I/2024.

Wakil Menteri Keuangan Suhail Nazara, mengatakan makin

tingginya restitusi menggambarkan adanya tekanan yang cukup berat dirasakan oleh pelaku industri.

Sejalan dengan itu, pemerintah pun berupaya keras untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru sehingga lebih kokoh dan tangguh merespons dinamika ekonomi terkini.

"Tantangan kita mencari sumber pertumbuhan baru, produk dalam negeri, umkm, penghiliran sumber pertumbuhan ekonomi kita [ke depan], kita harapkan terus lanjut," katanya, kemarin. Optimisasi sumber pertumbuhan baru serta dukungan maksimal dari sisi fiskal menjadi kunci agar Indonesia mampu bangkit dari lubang deindustrialisasi, alias terus turunnya porsi manufaktur dalam struktur PDB.

DEINDUSTRIALISASI DINI

Kementerian PPN/Bappenas mencatat, deindustrialisasi dini di negeri ini terjadi pada 2002. Kala itu, kontribusi industri pengolahan atau manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) mencapai 32%. Porsi itu terus menyusut hingga pada 2022 hanya tersisa 18,3%.

Pangkal persoalannya adalah lesatan harga komoditas yang pada akhirnya mengubah posisi Indonesia dari industrialisasi menjadi deindustrialisasi.

Pemangku kebijakan pun bak menempuh jalan pintas, karena tingginya harga komoditas meng-

gelembungkan penerimaan negara hingga kinerja ekspor. Tak perlu mengembangkan industri pengolahan.

Adapun saat ini, pemerintah memiliki empat tahap peningkatan porsi industri ke dalam PDB. Tahap 1 dilakukan pada 2022—2029 dengan menguatkan fondasi manufaktur.

Dalam fase ini, laju ekonomi diestimasikan 5,6%—6,1% dengan kontribusi industri pengolahan ke PDB menanjak menjadi 21,9%. Tahap selanjutnya dilakukan pada 2030 hingga 2045.

Dalam rangka mencapai target tersebut, ada tujuh fokus kebijakan industrialisasi. *Pertama*, penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

Kedua, modernisasi dan digitalisasi pertanian. *Ketiga*, *blue economy* dan *bio economy*. *Keempat*, ekonomi kreatif dan pariwisata. *Kelima*, produktivitas badan usaha milik negara (BUMN).

Keenam, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi. *Ketujuh*, memacu produktivitas tenaga kerja.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pelaku industri dalam 3 tahun terakhir memang dihadapkan pada tekanan yang beragam.

Dari dalam negeri, ada kendala dari sisi pembiayaan yang makin mahal lantaran Bank Indonesia

(BI) terus menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya perlawanan terhadap inflasi.

Apalagi, industri manufaktur tergolong ke dalam lapangan usaha yang memiliki risiko tinggi, sementara pemerintah dan industri jasa keuangan belum memiliki instrumen khusus berupa kredit manufaktur.

"Kondisi ini tentu, tidak *favorable* bagi pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi. Suku bunga relatif tinggi di Indonesia pun menambah tantangan dari pembiayaan," jelasnya.

Dalam rangka mencapai target tersebut, ada tujuh fokus kebijakan industrialisasi. *Pertama*, penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

Kedua, modernisasi dan digitalisasi pertanian. *Ketiga*, *blue economy* dan *bio economy*. *Keempat*, ekonomi kreatif dan pariwisata. *Kelima*, produktivitas badan usaha milik negara (BUMN).

Keenam, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi. *Ketujuh*, memacu produktivitas tenaga kerja.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pelaku industri dalam 3 tahun terakhir memang dihadapkan pada tekanan yang beragam.

Dari dalam negeri, ada kendala dari sisi pembiayaan yang makin mahal lantaran Bank Indonesia

(BI) terus menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya perlawanan terhadap inflasi.

Apalagi, industri manufaktur tergolong ke dalam lapangan usaha yang memiliki risiko tinggi, sementara pemerintah dan industri jasa keuangan belum memiliki instrumen khusus berupa kredit manufaktur.

Realisasi dan Proyeksi Kegiatan Usaha

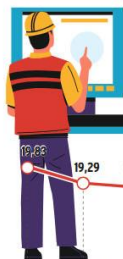
(%, Saldo Bersih Tertimbang/SBT)

Periode	% SBT
Kuartal IV/2022	10,71
Kuartal I/2023	11,05
Kuartal II/2023	16,62
Kuartal III/2023	15,65
Kuartal IV/2023	13,17
Kuartal I/2024	14,11
Proyeksi Kuartal II/2024	18,94

Prompt Manufacturing Index atau PMI BI (% Indeks)

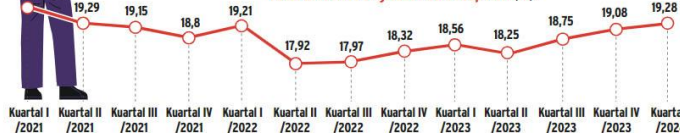
Periode	% Indeks
Kuartal IV/2022	50,06
Kuartal I/2023	50,75
Kuartal II/2023	52,39
Kuartal III/2023	52,93
Kuartal IV/2023	51,20
Kuartal I/2024	52,80
Proyeksi Kuartal II/2024	54,31

Merangkainya porsi manufaktur dalam struktur PDB dibayangi oleh ketidakpastian yang menekan aktivitas bisnis di dalam negeri.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia
BISNIS/MELBORN GHIZALI

Porsi Industri Pengolahan terhadap PDB (%)



Hlm: 11 - Kolom: Makro Ekonomi

Selasa, 7 Mei 2024

RKP 2025 Pijakan Awal Capai Visi Indonesia Emas

Pemerintah mengupayakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar Indonesia bisa memiliki mesin pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan di kemudian hari.

M ILHAM RAMADHAN AYSENA
ilham@mediaindonesia.com

PEMERINTAH tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Rangkaian program dan kegiatan yang sedang digodok itu merupakan pijakan awal bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

RKP merupakan titik krusial untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Itu sebabnya, kegiatan dan program strategis yang dapat mendorong visi pembangunan menjadi keniscaian untuk dituangkan dalam RKP 2025.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Musprenbangnas) 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, kemarin.

"RKP 2025 ini sesuatu yang *critical* karena *window* tadi dari RPJMN dimulai dari RKP 2025. Diperlukan pengembangan program baru, penajaman target, dan fokus dari program yang sudah ada, kolaborasi lintas, diarahkan Presiden untuk menyinkronkan, mengkomodasi, dan membuat jadi basis *Asta Cita* presiden terpilih. Itu sedang dilakukan Bappenas," ujar Suharso.

Dalam penyusunan RKP, lanjut Suharso, pemerintah juga mendorong agar ada upaya nyata untuk menemukan atau menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal itu dinilai penting agar Indonesia bisa memiliki mesin pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan di kemudian hari.

Setidaknya, sumber atau

mesin pertumbuhan ekonomi baru itu diharapkan mampu memompakan pendapatan nasional bruto (PNB/gross national income/GNI) mencapai US\$22 ribu per kapita pada 2045. Akselerasi yang kuat diperlukan lantaran saat ini PNB Indonesia berada di kisaran US\$5.000 per kapita.

Dalam RKP 2025 pula, pemerintah bakal membidik sejumlah target sasaran pembangunan krusial. Itu terutama pada bidang-bidang yang masih relatif tertinggal, seperti masalah kesehatan. Penurunan angka prevalensi *stunting* (tengkes) akan menjadi agenda prioritas yang diupayakan pengambil kebijakan.

Pasalnya, itu berkaitan dengan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang penting pada masa mendatang. Bappenas, kata Suharso, telah menggunakan penganggaran untuk menurunkan prevalensi tengkes agar tidak lagi menggunakan skema *multi-tagging*.

"Ke depan, soal *stunting* ini kita akan menerbitkan *inpres* (instruksi presiden) mengenai *stunting* karena belanja-belanja, baik di pusat maupun daerah itu *di-multi-tagging* sedemikian rupa. Kami usulkan program yang sasarannya tajam dan tegas, tidak perlu *multi-tagging*," jelasnya.

Dalam RKP 2025 pula, pemerintah memastikan tidak bertentangan pada angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi semesta. Kendati pertumbuhan tinggi diperlukan, imbuh Suharso, inklusivitas dan kualitas dari pertumbuhan ekonomi akan menjadi nilai lebih serta membuat kinerja perekonomian kian terasa positif bagi seluruh masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menjanjikan akan mengatasi tantangan sosial. Karena itu,



dibutuhkan pembangunan yang menasar pertumbuhan inklusif, mengukir pertumbuhan di wilayah, sekaligus mendorong pemerataan, serta mendapatkan asili daerah (PAD) masih belum dominan dalam struktur anggaran daerah.

Sejauh ini, imbuh Suharso, secara rerata 80% pendapatan daerah masih bergantung pada APBN. Rasio pajak daerah juga masih amat kecil, yakni di angka 0,51% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pajak dan retribusi daerah belum mampu untuk mendanai infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya. Karena itu, banyak hal yang menurutnya mesti dikerjakan dan direncanakan dengan baik.

Oleh karena itu, sinkronisasi agenda pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan. Dengan begitu, terdapat keselarasan antara belanja pusat

dan daerah yang mengintegrasikan program pembangunan. Integrasi disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, kepentingan pembangunan tiap daerah yang diukur berdasarkan indikator makro pembangunan.

Dorong sinkronisasi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong penjabat (pj) kepala daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana kerja yang disusun pemerintah pusat. Itu ditujukan agar muncul sinkronisasi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi, pj tolong jangan berleha-leha. Harus betul-betul mampu menangkap apa saja pesan dari pemerintah pusat. Misalnya, mengkomodasi dan menyesuaikan sambil memberikan masukan untuk daerah

ah (APBD), baik dalam pendapatan maupun belanja. Selain meralisasikan belanja target sasaran, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD.

"Jadi, jangan hanya memikirkan bagaimana caranya menghabiskan APBD, bukan, tetapi bagaimana untuk membuat APBD itu *postur* PAD-nya meningkat," tandas Tito.

Guna meningkatkan PAD, imbuhnya, penda perlu menggeliatkan sektor swasta. Itu dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan, memperjelas rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan mempermudah pembuatan rencana detail tata ruang (RDTR).

Tito berharap seluruh jajaran penda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang baik, terutama rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). (X-10)

MUSRENBANGNAS 2024: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monofaria memberikan sambutan saat seremoni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan Kementerian PPN/Bappenas di JCC, Jakarta, kemarin. Musrenbangnas 2024 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin itu digelar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Domestic spending buoys GDP growth in first quarter

Economic output up 5.11% year-on-year, beating forecasts

Deni Ghifari

The Jakarta Post/Jakarta

Buoyed by elevated domestic consumption during the Islamic festive season and the presidential election, Indonesia's economy again exceeded market expectations as it posted gross domestic product (GDP) growth of 5.11 percent year-on-year (yoy) in the first quarter.

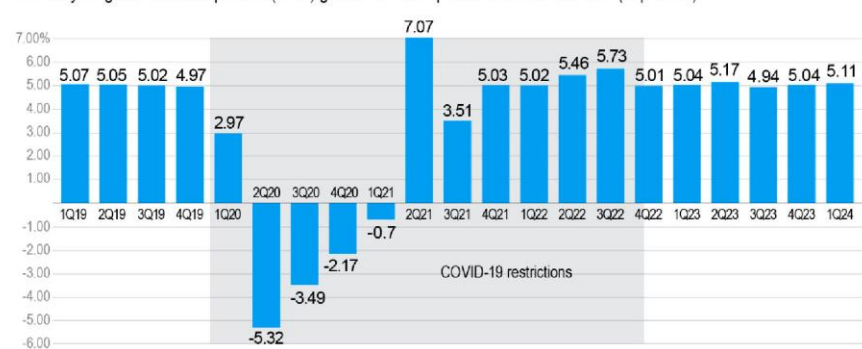
Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said in a press statement released on Monday that the quality of economic growth was "increasing significantly", given that the unemployment rate had dropped below the pre-pandemic level.

"Amid global uncertainty, Indonesia's economy continued to show resilience," the minister said following the publication of the GDP report, before promising that the government would make use of the state budget to maintain economic stability and push growth higher.

Her statement claimed that household spending was mainly driven by low inflation and in-

Indonesia's economic growth accelerates in first three months of 2024

Year-on-year gross domestic product (GDP) growth for each quarter since start of 2019 (In percent)



Shaded area shows the period of restrictions imposed by the government to contain the coronavirus pandemic
Source: Statistics Indonesia

JP/Deni Ghifari

creased economic activity during Ramadan, as well as by Idul Fitri bonuses and civil servant pay raises.

The economic growth figure marks an increase from the 5.04 percent logged in the fourth quarter of 2023 as well as in the first quarter of 2023.

It also came in higher than the 4.9 percent forecast from

Moody's Analytics and a 5 percent consensus forecast from economists polled by Reuters.

Interim Statistics Indonesia (BPS) head Amalia Adininggar Widayanti revealed on Monday that domestic consumption made up 54.93 percent of the country's GDP in the first quarter. That share has steadily grown since 2022.

"The increase of the [house-

hold spending] share is in line with people's rising purchasing power," Amalia said.

She detailed that household spending in preparation for the festive season of Ramadan and Idul Fitri, as well as government spending ahead of the election, had "boosted" overall consumption.

INVESTOR DAILY

INDONESIA

SELASA, 7 MEI 2024

Pertumbuhan Masih Andalkan Konsumsi



Pertumbuhan & Kontribusi PDRB berdasarkan Pulau (Kuartal I-2024)

Oleh Arnoldus Kristianus, Imam Suhartadi, dan Heru Febrianto

JAKARTA, ID – Konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat ini, bahkan hingga 2045. Kondisi ini dinilai rawan terhadap pelemahan, apalagi jika pertumbuhan tersebut bersifat situasional, sehingga harus diimbangi dengan investasi dan ekspor.

Pada kuartal I 2024, konsumsi rumah tangga tercatat memberikan kontribusi terbesar yaitu 54,93% terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2024 tumbuh 4,91% secara *year on year*. Jika dirinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada transportasi dan komunikasi, yang tercermin dari pertumbuhan indeks perdagangan eceran untuk komoditas suku cadang dan aksesoris, bahan bakar kendaraan, serta pertumbuhan jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara. Geliat restoran dan hotel, tercermin dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel.

Konsumsi pemerintah juga tumbuh hingga 19,9% secara *year on year* pada kuartal I-2024. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 6,25% ke pertumbuhan ekonomi, menjadi yang tertinggi sejak tahun 2006. Konsumsi pemerintah utamanya didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang, terutama pada kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024. serta kenaikan realisasi belanja pegawai.

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 yang mencapai angka 5,11% didorong oleh faktor temporer yang musiman.

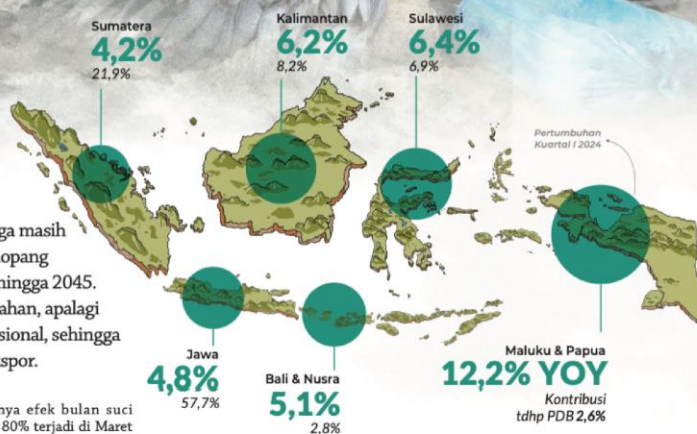
Pertama, adanya efek bulan suci Ramadan yang 80% terjadi di Maret 2024 sehingga turut mendorong konsumsi masyarakat. Pada bulan Maret, sebagian masyarakat juga sudah mulai melakukan mudik ke kampung halaman.

"Faktor kedua yakni efek pemilu pada Februari kemarin, jadi kedua faktor temporer dan musiman ini yang menstimulus pertumbuhan ekonomi kuartal I dibanding kuartal IV-2023," kata Eko saat dihubungi *Investor Daily*, Senin (06/05/2024).

Meski demikian, menurutnya, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan periode bulan suci Ramadan 2023. Pada periode tersebut, bulan Ramadan yang jatuh pada kuartal II-2023 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%. Hal ini menggambarkan masih adanya tekanan pada tingkat konsumsi rumah tangga yang tercatat hanya tumbuh 4,91% di kuartal I-2024 atau masih dibawah angka 5%.

Menuru Eko, pertumbuhan yang mengandalkan konsumsi rumah tangga masih tergolong sehat, jika diikuti dengan lapangan kerja yang besar dan masyarakat yang produktif. Selain itu, kata dia, konsumsi bukan untuk dihindari, tapi untuk diseimbangkan dengan investasi dan ekspor.

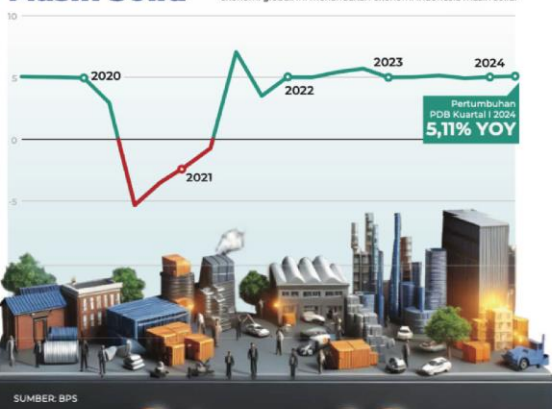
"Sampai 2045 juga konsumsi tetap akan dominan," ujarnya.



SUMBER: BPS

Ekonomi Indonesia Masih Solid

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, 2019-2024. PDB Indonesia pada kuartal I 2024 masih berada di atas 5% di tengah gejolak ekonomi global. Ini menandakan ekonomi Indonesia masih solid.



SUMBER: BPS

INVESTOR DAILY

INDONESIA

SELASA, 7 MEI 2024

Ekonomi Solid, Tingkat Pengangguran Menurun

JAKARTA, ID – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menjadi 7,2 juta pengangguran terbuka atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka 4,82%. Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal selama Februari 2023–Februari 2024 juga kembali meningkat, setelah tiga tahun pada masa pandemi Covid-19 terus turun.

Oleh **Arnoldus Kristianus**

TPT menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adiningsih Widayanti mengatakan, TPT mengalami penurunan sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan Februari 2023. "Jumlah TPT ini lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran sebelum pandemi Covid-19 di mana pada Februari 2020 4,94%," kata Amalia dalam konferensi pers secara hibrida di Gedung BPS, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis penurunan proporsi pekerja informal tersebut memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional, karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau memiliki stabi-

litas pekerjaan yang lebih baik.

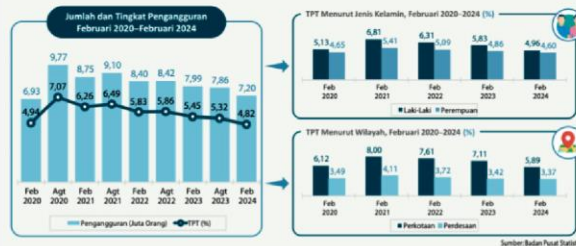
"Kualitas pertumbuhan meningkat signifikan, tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level di bawah prapandemi. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja," jelas Menkeu.

BPS mencatat, pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 4,96%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,60%. TPT laki-laki dan perempuan turun dibandingkan Februari 2023, masing-masing sebesar 0,87% dan 0,26%. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,89%) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (3,37%). Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,22% dan 0,05%.

Pada Februari 2024, TPT penduduk kelompok umur muda (15–24 tahun) merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 16,42%. Sementara itu, TPT penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling ren-

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurun

Terjadi penurunan jumlah dan tingkat pengangguran



dah, yaitu sebesar 1,14%. Pola TPT menurut kelompok umur tersebut juga sama dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan Februari 2023, hanya kelompok umur tua (60 tahun ke atas) yang mengalami kenaikan TPT yakni sebesar 0,01%.

"Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini konsisten terjadi baik pada penduduk laki laki maupun perempuan dan juga di wilayah perkotaan maupun pedesaan seluruhnya sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi atau di bulan Februari 2020," tutur Amalia.

Bila dibandingkan dengan kondisi Februari 2023, maka seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Dalam satu tahun terakhir, tiga lapangan usaha tersebut dapat menyerap masing-masing tenaga kerja sebanyak 0,03 juta, 0,85 juta, dan 0,05 juta tenaga kerja.

"Dalam setahun terakhir lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah akomodasi makanan

minuman, kemudian perdagangan dan administrasi pemerintahan yang masing-masing mampu menyerap sekitar 0,96 juta, 0,85 juta, dan 0,76 juta tenaga kerja," ungkap Amalia.

Bila dilihat secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, naik 2,76 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,50% dibanding Februari 2023. "Sejalan dengan aktivitas ekonomi yang tetap

kuat tingkat partisipasi angkatan kerja terus membaik," tutur Amalia.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta orang, naik sebanyak 3,55 juta orang dari Februari 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum sebesar 0,96 juta orang. Pada Februari 2024 sebanyak 58,05 juta orang (40,83%) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,95% poin dibanding Februari 2023.

Persentase setengah pengangguran pada Februari 2024 naik sebesar 1,61%, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 0,73% dibanding Februari 2023. Jumlah pekerja komuter Februari 2024 sebesar 7,13 juta orang, turun sebesar 0,05 juta orang dibanding Februari 2023.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan, pada Februari 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 84,13 juta orang (59,17%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 58,05 juta orang (40,83%). Dibandingkan Februari 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,95%. **(th/ant)**